



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

		dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 9. Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja 10. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 11. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Sumbawa
7.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1. Penyempurnaan Tim Manajemen Perubahan 2. Pengembangan Strategi Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan
8.	Peningkatan Pelayanan Publik	1. Penyusunan Standar Pelayanan 2. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal 3. Pembinaan dan Kompetensi Unit Pelayanan Publik 4. Penyusunan, Penerapan Monitoring dan Evaluasi SPM 5. Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

		6. Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik 7. Fasilitasi Penyusunan Laporan SPM Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
--	--	--



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

BAB IV

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA TAHAP II**

A. PETA IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

1. QUICK WINS

NAMA PROGRAM : QUICK WINS 1

**NAMA KEGIATAN : E-SERVICE BIDANG SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN 2017												Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana	KET	
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	Tahapan 1 Penguatan dan Pengembangan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan														Pengelola Web Kabupaten	
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi														Tim Sosialisasi dan Pengelola Web Kabupaten	
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan														Tim Sosialisasi dan Pengelola Web Kabupaten	

Catatan : Pengelola Web Kabupaten (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Sumbawa)



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NAMA PROGRAM : QUICK WINS 2

NAMA KEGIATAN : E-SERVICE BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN 2017												Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana	KET
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	Tahapan 1 Penataan Pelayanan Perizinan dan Investasi (Penguatan SPIPISE, SIPID, Launching Inovasi Layanan)													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Catatan : Peningkatan dan perbaikan sistem pelayanan perizinan dan investasi dan pengembangan layanan perizinan dan inovasi layanan Si Cantik, Layanan 5 (Lima) Hari Jadi dan Layanan Laris 60 Menit oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NAMA PROGRAM : QUICK WINS 3
NAMA KEGIATAN : E-SERVICE BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN 2017												Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana	KET
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	Tahapan 1 Pengkajian Pelimpahan Kewenangan dan Penatanaan Pelayanan di Kecamatan													Tim PATEN Kabupaten	
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi													Tim PATEN Kabupaten	
3	Tahapan 3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan													Tim PATEN Kabupaten	

Catatan : Tim PATEN Kabupaten terdiri dari (Setda, Bappeda, DPPK dan BKPP)



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NAMA PROGRAM : QUICK WINS 4

NAMA KEGIATAN : E-PROCUREMENT

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN 2017												Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana	KET
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	Tahapan 1 Penguatan dan Peningkatan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik													SETDA	
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi													SETDA	
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan													SETDA	

Catatan : Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SETDA



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

2. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

NAMA PROGRAM : MANAJEMEN PERUBAHAN

NAMA KEGIATAN : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana				
		2017				2018				2019				2020				2021					2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Tahapan 1 Persiapan Penataan kembali Pembentukan Tim																									Tim Manajemen Perubahan
2	Tahapan 2 Pembentukan Tim																									Tim Manajemen Perubahan
3	Tahapan 3 Penyusunan Agenda Kerja																									Tim Manajemen Perubahan

Catatan : Tim Manajemen Perubahan terdiri dari SETDA, Bappeda, Inspektorat, BKPP masing-masing koordinator atau ketua pelaksana area perubahan



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NAMA PROGRAM : MANAJEMEN PERUBAHAN

NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Penyusunan Draft Strategi Manajemen Perubahan (review)																									Tim Manajemen Perubahan
2	Tahapan 2 Pengembang an Draft Strategi Manajemen Perubahan																									Tim Manajemen Perubahan
3	Tahapan 3 Penetapan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan																									Tim Manajemen Perubahan

NAMA PROGRAM : MANAJEMEN PERUBAHAN

**NAMA KEGIATAN : SOSIALISASI DAN INTERNALISASI MANAJEMEN
PERUBAHAN**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Penyiapan bahan sosialisasi dan internalisasi																									Tim Manajemen Perubahan
2	Tahapan 2 Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi																									Tim Manajemen Perubahan
3	Tahapan 3 Evaluasi kegiatan																									Tim Manajemen Perubahan



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

**3. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN**

NAMA PROGRAM : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
**NAMA KEGIATAN : PENATAAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH KAB.
SUMBAWA**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Persiapan Pembentukan Tim																									SETDA
2	Tahapan 2 Identifikasi dan harmonisasi regulasi daerah																									SETDA
3	Tahapan 3 Finalisasi hasil																									SETDA

Catatan : Bagian Hukum SETDA

NAMA PROGRAM : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN PETA REGULASI DAERAH

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana				
		2017				2018				2019				2020				2021					2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Tahapan 1 Persiapan Identifikasi Regulasi																									SETDA
2	Tahapan 2 Penyusunan Peta Regulasi Daerah																									SETDA
3	Tahapan 3 Evaluasi kegiatan																									SETDA

Catatan : Bagian Hukum SETDA



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

4. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

NAMA PROGRAM : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

**NAMA KEGIATAN : RESTRUKTURISASI/PENATAAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Penataan struktur, tugas dan fungsi Perangkat daerah																									Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
2	Tahapan 2 Penetapan hasil penataan																									Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Catatan : Tim Penataan Kelembagaan Perangkat daerah terdiri dari SETDA, Bappeda, DPPK dan BKPP, Penataan kelembagaan pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan UU no.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah telah dilaksanakan pada Tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan pemetaan dan penataan terhadap kelembagaan perangkat daerah yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk evaluasi kinerja kelembagaan perangkat daerah.



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NAMA PROGRAM : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

NAMA KEGIATAN : PENGUATAN KELEMBAGAAN SECARA FUNGSIONAL

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana				
		2017				2018				2019				2020				2021					2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Tahapan 1 Persiapan kajian peningkatan kapasitas kelembagaan secara fungsional perangkat daerah																									Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
2	Tahapan 2 Finalisasi hasil																									Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Catatan : Tim Penataan Kelembagaan Perangkat daerah terdiri dari SETDA,
Bappeda, BPKAD, Bapenda dan BKPP



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NAMA PROGRAM : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

**NAMA KEGIATAN : PEMBERDAYAAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Persiapan kajian pemberdaya an kapasitas kelembagaan																									Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
2	Tahapan 2 Finalisasi hasil																									Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Catatan : Tim Penataan Kelembagaan Perangkat daerah terdiri dari SETDA,
Bappeda, BPKAD dan BKPP

5. PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA

NAMA PROGRAM : PENATAAN TATA LAKSANA

**NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN SOP (STANDARD
OPERATING PROCEDURES)**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
I	Tahapan 1 : Identifikasi Penyusunan SOP																									
a	Inventarisasi kebutuhan SOP																									Tim Penyusun SOP
b	Pemetaan SOP yang ada dan yang perlu diperbaharui																									Tim Penyusun SOP
c	Penyusunan instrumen SOP baik																									Tim Penyusun SOP



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	menyusun baru, perbaikan atau penyempurnaan.																									
d	Review dan integrasi draft SOP																									Tim Penyusun SOP
e	Finalisasi Dokumen SOP																									Tim Penyusun SOP
f	Penetapan Dokumen																									Tim Penyusun SOP
2	Tahapan 2: Internalisasi, Sosialisasi dan Implementasi																									
a	Internalisasi SOP kepada semua aparatur																									Kepala Perangkat Daerah dan Tim Penyusun SOP
b	Sosialisasi SOP kepada Stakeholder																									Kepala Perangkat Daerah dan Tim Penyusun SOP
c	Implementasi SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi																									Kepala Perangkat Daerah dan Tim Penyusun SOP
3	Tahapan 3 : Evaluasi Kegiatan Penyusunan SOP																									
a	Monitoring pelaksanaan/ implementasi SOP																									Tim Penyusun SOP
b	Evaluasi SOP																									Tim Penyusun SOP

Catatan : Tim Penyusun SOP masing – masing Perangkat daerah



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NAMA PROGRAM : PENATAAN TATA LAKSANA

NAMA KEGIATAN : PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan kajian pengembang an <i>E-Govern ment</i>																									Tim Pengemb. <i>E-Government</i>
2	Penyiapan instrumen dan sistem Tata Naskah Dinas Elektronik																									Tim Pengemb. <i>E-Government</i>
3	Pembenahan dan peningkatan sistem teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan <i>E-Government</i>																									Tim Pengemb. <i>E-Government</i>
4	Sosialisasi dan internalisasi implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik dan SMS Gateway																									Tim Pengemb. <i>E-Government</i>
5	Evaluasi Kegiatan																									Tim Pengemb. <i>E-Government</i>

Catatan Tim Pengembangan E-Government terdiri dari Setda dan Dinas Kominfotik



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

6. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA KEGIATAN : PENATAAN SISTEM REKRUITMEN APARATUR

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Pengembang an dan Perbaikan Sistem Rekrutmen Pegawai																									Tim Pengadaan Pegawai
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan implementasi Sistem Pengadaan Pegawai dengan CAT (Computer Assesment Test)																									Tim Pengadaan Pegawai
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Tim Pengadaan Pegawai

Catatan : Tim Pengadaan Pegawai terdiri dari SETDA dan BKPP



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA KEGIATAN : ANALISIS JABATAN

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Penyusunan dan penyempurna an Analisis Jabatan																									Tim Analis Jabatan
2	Tahapan 2 Sosialisasi Hasil Analisis Jabatan																									Tim Analis Jabatan
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Tim Analis Jabatan

Catatan : Tim Analis Jabatan masing – masing Perangkat daerah

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA KEGIATAN : ANALISIS BEBAN KERJA

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Penyusunan dan penyempurna an analisis beban kerja																									Tim Analis Beban Kerja
2	Tahapan 2 Sosialisasi Hasil Analisis Beban Kerja																									Tim Analis Beban Kerja
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Tim Analis Beban Kerja

Catatan : Tim Analis Beban Kerja masing – masing Perangkat Daerah



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA KEGIATAN : EVALUASI JABATAN

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana				
		2017				2018				2019				2020				2021					2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Tahapan 1 Penyusunan Evaluasi Jabatan																									Tim Evaluasi Jabatan
2	Tahapan 2 Sosialisasi Hasil Evaluasi Jabatan																									Tim Evaluasi Jabatan
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Tim Evaluasi Jabatan

Catatan : Tim Evaluasi Jabatan masing – masing Perangkat Daerah

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan																									Tim Penyusun SKJ
2	Tahapan 2 Sosialisasi Standar Kompetensi Jabatan																									Tim Penyusun SKJ
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Tim Penyusun SKJ

Catatan : Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan masing – masing Perangkat Daerah



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

**NAMA KEGIATAN : ASSESMENT APARATUR BERDASARKAN
KOMPETENSI**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Penyusunan Rencana Assesmen Aparatur berdasarkan Kompetensi																									Tim Assesmen Aparatur
2	Tahapan 2 Pelaksanaan assesmen terhadap pejabat struktural																									Tim Assesmen Aparatur
3	Tahapan 3 Pemetaan hasil assesmen pejabat struktural																									Tim Assesmen Aparatur

Catatan : Tim Assesment Aparatur terdiri dari SETDA dan BKPP

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA KEGIATAN : PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Pengembang an dan pembenahan Sistem																									SETDA, BKPP
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan implementasi sistem																									SETDA, BKPP
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									SETDA, BKPP

Catatan : Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA, BKPP



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA KEGIATAN : PENGEMBANGAN DATA BASE KEPEGAWAIAN

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Pengembang an dan pembenahan data base																									BKPP
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi sistem data base																									BKPP
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									BKPP

Catatan : Bidang Administrasi Umum Kepegawaian BKPP dan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian pada masing – masing perangkat daerah

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA KEGIATAN : PENGEMBANGAN DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat. Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Pengembang an dan pembenahan diklat berbasis kompetensi																									BKPP
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi diklat berbasis kompetensi																									BKPP
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									BKPP

Catatan : Bidang Diklat BKPP



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN POLA KARIR

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Pengembang an dan pembenahan sistem pola karir aparatur																									BKPP
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi sistem pola karir																									BKPP
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									BKPP

Catatan : Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Aparatur BKPP

7. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

NAMA PROGRAM : PENGUATAN PENGAWASAN

**NAMA KEGIATAN : PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Tahapan 1 Pemahaman komprehensif terhadap PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah																										
a	Pemetaan kondisi SPIP																										Inspektorat
b	Membentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP																										Inspektorat
c	Diklat Satgas SPIP dalam rangka percepatan																										Inspektorat
d	Penyusunan petunjuk teknis penerapan SPIP																										Inspektorat



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan implementasi SPIP																									Inspektorat
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Inspektorat

Catatan : Inspektorat Kabupaten Sumbawa

NAMA PROGRAM : PENGUATAN PENGAWASAN

**NAMA KEGIATAN :PENINGKATAN PERAN APARATUR PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH (APIP) SELAKU QUALITY
ASSURANCE**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Penyusunan susunan, tugas dan tanggung jawab pemeriksa sesuai dengan standar pemeriksaan																									
a	Penyusunan Prosedur Pemeriksaan																									Inspektorat
b	Pemeriksaan yang dilakukan aparatur pengawasan																									Inspektorat
c	Pelaporan hasil pemeriksaan																									Inspektorat
d	Identifikasi perbaikan proses pemeriksaan																									Inspektorat
e	Tindak Lanjut hasil pemeriksaan																									Inspektorat
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan implementasi Pedoman Pengawasan																									Inspektorat
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Inspektorat

Catatan : Inspektorat Kabupaten Sumbawa



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

8. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NAMA PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

**NAMA KEGIATAN : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana			
		2017				2018				2019				2020				2021				2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Tahapan 1 Review petunjuk teknis pelaporan akuntabilitas kinerja																												
a	Penyusunan Pedoman Evaluasi LKJIP pada unit kerja																												Tim Penyusun LKJIP
b	Rapat – rapat koordinasi proses penyusunan LKJIP																												Tim Penyusun LKJIP
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan implementasi Pedoman Penyusunan LKJIP																												Tim Penyusun LKJIP
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																												Tim Penyusun LKJIP
4	Evaluasi LKJIP perangkat daerah																												Tim Penyusun LKJIP

Catatan : Tim Penyusun LKJIP pada masing – masing perangkat daerah



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NAMA PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NAMA KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Tahapan 1 Pengembang an dan pembenahan sistem manajemen kinerja organisasi																									SETDA
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi sistem manajemen kinerja organisasi																									SETDA
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									SETDA

Catatan : Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA

NAMA PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

**NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
PENETAPAN KINERJA (PK)**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Tahapan 1 Review IKU dan PK dari perangkat daerah																										
a	Penyusunan Draft Perbup tentang IKU dan PK																										Tim Penyusun IKU dan PK
b	Rapat – rapat koordinasi proses penyusunan IKU dan PK bersama masing – masing perangkat daerah																										Tim Penyusun IKU dan PK



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana				
		2017				2018				2019				2020				2021					2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan implementasi IKU dan PK pada masing-masing perangkat daerah																									Tim Penyusun IKU dan PK
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																									Tim Penyusun IKU dan PK

Catatan : Tim Penyusun IKU dan PK pada masing – masing perangkat daerah

9. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NAMA PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

**NAMA KEGIATAN : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
UNIT PELAYANAN**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana				
		2017				2018				2019				2020				2021					2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Tahapan 1 : Pengembangan Sistem Pelayanan Publik																									
a	Identifikasi Unit Kerja Pelayanan																						Tim Penyusun SPP			
b	Pemetaan Standar Pelayanan yang ada dan yang perlu diperbaharui																						Tim Penyusun SPP			
c	Penyusunan instrumen dan penerapan SPP pada unit pelayanan																						Tim Penyusun SPP			
d	Integrasi dan finalisasi dokumen SPP																						Tim Penyusun SPP			
e	Penetapan Dokumen																						Tim Penyusun SPP			
2	Tahapan 2: Internalisasi, Sosialisasi dan Implementasi																									
a	Internalisasi dokumen SPP kepada semua unit pelayanan																						Tim Penyusun SPP			



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
b	Sosialisasi SPP kepada Stakeholder																									Tim Penyusun SPP
c	Implementasi SPP dalam pelaksanaan tupoksi unit pelayanan																									Tim Penyusun SPP
3	Tahapan 3 : Evaluasi Kegiatan Penyusunan SPP																									
a	Monitoring pelaksanaan/ implementasi SPP																									Tim Penyusun SPP
b	Evaluasi SPP																									Tim Penyusun SPP

Catatan : Tim Penyusun SPP masing – masing perangkat daerah

NAMA PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

**NAMA KEGIATAN : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
UNIT KERJA**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana				
		2017				2018				2019				2020				2021					2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Tahapan 1 : Persiapan penerapan Standar Pelayanan Minimal																									
a	Identifikasi penerapan SPM pada unit kerja																									Tim Penyusun Penerapan SPM
b	Pemetaan penerapan SPM pada unit kerja yang memiliki SPM																									Tim Penyusun Penerapan SPM
c	Penyusunan instrumen dan penerapan SPM pada unit kerja																									Tim Penyusun Penerapan SPM
d	Integrasi dan finalisasi dokumen penerapan SPM																									Tim Penyusun Penerapan SPM
e	Penetapan Dokumen SPM																									Tim Penyusun Penerapan SPM



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2	Tahapan 2: Internalisasi, Sosialisasi dan Implementasi																									
a	Internalisasi dokumen penerapan SPM kepada semua unit kerja																									Tim Penyusun Penerapan SPM
b	Sosialisasi penerapan SPM kepada Stakeholder																									Tim Penyusun Penerapan SPM
c	Implementasi penerapan SPM pada unit kerja																									Tim Penyusun Penerapan SPM
3	Tahapan 3 : Evaluasi Kegiatan Penyusunan Penerapan SPM																									
a	Monitoring pelaksanaan/ implementasi SPM																									Tim Penyusun Penerapan SPM
b	Evaluasi penerapan SPM																									Tim Penyusun Penerapan SPM

Catatan : Tim Penyusun Penerapan SPM masing – masing perangkat daerah

10. PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

NAMA PROGRAM : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

NAMA KEGIATAN : MONITORING

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana				
		2017				2018				2019				2020				2021					2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Tahapan 1 : Persiapan																									
a	Penyempurnaan pedoman teknis penyelenggaraan program dan kegiatan																									Tim Monev
b	Pengembangan sistem informasi monitoring program dan kegiatan berbasis internet																									Tim Monev



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																								Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2	Tahapan 2: Internalisasi, Sosialisasi dan Implementasi																									
a	Internalisasi prosedur dan mekanisme monitoring secara efektif dan berjenjang pada unit kerja																									Tim Monev
b	Sosialisasi monitoring pada rapat pimpinan maupun rakor																									Tim Monev
c	Implementasi monitoring secara tepat																									Tim Monev
3	Tahapan 3 : Evaluasi Kegiatan Monitoring																									
a	Evaluasi ketepatan pelaksanaan monitoring																									Tim Monev
b	Evaluasi dampak kegiatan																									Tim Monev

Catatan : Tim Monev terdiri dari SETDA, Bappeda, BPKAD, BKPP dan Inspektorat

NAMA PROGRAM : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

NAMA KEGIATAN : EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUNAN

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana					
		2017				2018				2019				2020				2021					2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	
1	Tahapan 1 : Persiapan																										
a	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan																										Tim Monev
b	Pengembang an dan peningkatan pemahaman mengenai penyusunan laporan evaluasi tahunan pada masing – masing program Reformasi Birokrasi																										Tim Monev



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana					
		2017				2018				2019				2020				2021					2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	
2	Tahapan 2 Implementasi evaluasi tahunan melalui rapat pimpinan, rakor atau forum lainnya																										Tim Monev
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																										Tim Monev

NAMA PROGRAM : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

NAMA KEGIATAN : EVALUASI DAN PELAPORAN LIMA TAHUNAN

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHUN																				Perangkat Daerah/ Tim Pelaksana				
		2017				2018				2019				2020				2021					2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Tahapan 1 : Persiapan																									
a	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Lima Tahunan																						Tim Monev			
b	Pengembang an dan peningkatan pemahaman mengenai penyusunan laporan evaluasi lima tahunan pada masing – masing program Reformasi Birokrasi																						Tim Monev			
2	Tahapan 2 Implementasi evaluasi lima tahunan melalui rapat pimpinan, rakor atau forum lainnya																						Tim Monev			
3	Tahapan 3 Evaluasi Kegiatan																						Tim Monev			

Catatan : Tim Monev terdiri dari SETDA, Bappeda, BPKAD, BKPP dan Inspektorat dan assesor masing-masing perangkat daerah



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

B. KRITERIA KEBERHASILAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
1.	QUICK WINS	<i>E – Service</i> Bidang Sistem Informasi Pemerintahan	1. Terbangunnya sistem informasi bidang pemerintahan, <i>web – site</i> yang dapat berfungsi sebagai media peningkatan pelayanan. 2. Peningkatan dan Pengembangan jumlah akses pada <i>web – site</i>. 3. Peningkatan jaringan <i>web-site</i>. 4. Penyampaian data informasi yang akurat.
		<i>E – Service</i> Bidang Pelayanan Perizinan dan Investasi dan Inovasi Layanan Perizinan seperti (Si Cantik, Laris 60 Menit dan Pelayanan 5 (lima) hari jadi)	1. Terbangunnya sistem informasi bidang pelayanan perizinan dan investasi. 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan investasi. 3. Meningkatnya investasi di daerah.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		<i>E – Service</i> Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1. Terwujudnya Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. 2. Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
		<i>E – Procurement</i>	1. Terwujudnya pemberian pelayanan dibidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang profesional, aman, cepat, mudah, efektif, efisien, transparan, terbuka dan bersaing, adil dan akuntabel. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa.
2.	MANAJEMEN PERUBAHAN	Pembentukan Tim Manajemen Perubahan	1. Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan. 2. Terbangunnya Kinerja Tim Manajemen Perubahan.



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan	1. Adanya dokumen strategi manajemen perubahan sebagai pedoman pelaksanaan program. 2. Terimplementasinya strategi manajemen perubahan.
		Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan	1. Tersosialisasinya agenda program strategi manajemen perubahan kepada <i>stakeholders</i> . 2. Adanya internalisasi strategi manajemen perubahan kepada <i>stakeholders</i> . 3. Terbangunnya budaya perubahan di internal pemerintahan.
3.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Penataan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa	1. Terbangunnya data base bidang hukum dan perundang-undangan. 2. Adanya hasil review atau harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
			3. Adanya hasil evaluasi perundang-undangan di daerah yang dapat digunakan untuk kegiatan deregulasi maupun regulasi
		Penyusunan Peta Regulasi Daerah	1. Terwujudnya peta dan program regulasi daerah. 2. Adanya sosialisasi dan dokumentasi peta regulasi daerah.
4.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	Restrukturisasi/Penataan Kelembagaan Perangkat daerah	1. Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing bureaucracy</i>). 2. Terbangunnya tugas pokok dan fungsi yang tidak tumpang tindih, <i>overload</i> maupun tarik ulur kewenangan. 3. Adanya kejelasan dan kesesuaian dengan urusan yang ditangani.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		Penguatan Kelembagaan Secara Fungsional	1. Terwujudnya organisasi yang berorientasi fungsional. 2. Adanya wadah jabatan fungsional di dalam kelembagaan organisasi perangkat daerah.
		Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Perangkat daerah	1. Adanya kajian dan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah. 2. Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.
5.	PENATAAN TATA LAKSANA	Penyusunan Dokumen SOP (<i>Standard Operating Procedures</i>)	1. Tersusunnya hasil identifikasi dan inventarisasi kebutuhan SOP. 2. Adanya pemetaan SOP yang ada dan yang perlu diperbaharui. 3. Tersusunnya instrumen SOP (baru, pengembangan maupun perubahan/penggantian)



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
			4. Tersusunnya dokumen SOP final pada masing – masing unit kerja. 5. Adanya pemahaman semua pihak terhadap SOP yang ada. 6. Tersosialisasinya SOP kepada <i>stakeholders</i> . 7. Terimplementasinya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
		Pengembangan <i>e - Government</i>	1. Adanya kajian pengembangan <i>e – government</i> dan penguatan sistem yang sudah ada. 2. Tersusunnya instrument dan sistem Tata Naskah Dinas Elektronik. 3. Adanya pembenahan dan peningkatan sistem teknologi informasi (keuangan, kepegawaian, pendidikan, kependudukan, pencatatan sipil, kearsipan dan



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
			ketenagakerjaan). 4. Tersosialisasinya Tata Naskah Dinas Elektronik dan SMS Gateway. 5. Terinternalisasinya e – government kepada stakeholders. 6. Terimplementasinya e – government.
6.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	Penataan Sistem Rekrutmen Aparatur	1. Tersusunnya pengembangan dan perbaikan sistem rekrutmen pegawai. 2. Tersosialisasinya sistem pengadaan pegawai. 3. Terimplementasinya pengadaan pegawai yang transparan, akuntabel dan mudah diakses publik.
		Analisis Jabatan	1. Tersediannya dokumen hasil analisis jabatan. 2. Adanya penetapan hasil analisis jabatan. 3. Terimplementasinya hasil analisis jabatan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan tiap jabatan.



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		Analisis Beban Kerja	1. Tersedianya dokumen hasil analisis beban kerja. 2. Adanya penetapan hasil analisis beban kerja. 3. Terimplementasinya hasil analisis beban kerja sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan tiap jabatan.
		Evaluasi Jabatan	1. Tersedianya rangking jabatan. 2. Tersedianya tingkatan jabatan. 3. Tersedianya harga setiap jabatan. 4. Tersedianya pedoman pemberian tunjangan kinerja.
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	1. Tersedianya dokumen standar kompetensi pada setiap jabatan. 2. Penetapan standar kompetensi jabatan. 3. Terimplementasinya standar kompetensi jabatan sebagai dasar penentuan kompetensi seseorang.



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		Assesmen Aparatur Berdasarkan Kompetensi	1. Tersedianya hasil inventarisasi dan identifikasi kompetensi pejabat struktural dan fungsional. 2. Tersusunnya peta profil kompetensi individu seluruh pejabat structural dan fungsional.
		Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu	1. Tersedianya pedoman penilaian kinerja individu. 2. Terimplementasinya sistem penilaian kinerja individu yang terukur.
		Pengembangan Data Base Kepegawaian	1. Tersedianya data base kepegawaian yang <i>up to date</i> dan valid. 2. Tersedianya data dan informasi eksekutif pegawai (untuk keperluan Baperjakat).



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		Pengembangan Diklat Berbasis Kompetensi	1. Tersedianya hasil analisis diklat baik teknis maupun fungsional. 2. Tersedianya dokumen diklat berbasis kompetensi. 3. Terimplemntasinya diklat berbasis kompetensi.
		Penyusunan Pola Karir	1. Tersedianya pengembangan dan pembenahan sistem pola karir aparatur. 2. Terimplementasinya pola karir aparatur.
7.	PENGUATAN PENGAWASAN	Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Terinternalisasi pemahaman sistem pengendalian internal pemerintah. 2. Tersedianya hasil pemetaan kondisi SPIP. 3. Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) SPIP. 4. Terlaksananya diklat satgas SPIP. 5. Terimplementasinya SPIP.



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		Peningkatan Peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Selaku <i>Quality Assurance</i>	1. Tersusunnya standar dan prosedur pemeriksaan dan pengawasan reguler. 2. Terimplementasinya pedoman pengawasan.
8.	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Tersusunnya pedoman evaluasi pelaporan LKJIP pada unit kerja (Perangkat daerah). 2. Tersosialisasinya pedoman evaluasi pelaporan LKJIP. 3. Tersedianya LKJIP tiap tahun.
		Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi	1. Tersusunnya instrument manajemen kinerja organisasi. 2. Terimplementasinya sistem manajemen kinerja organisasi.
		Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK)	1. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) pada masing-masing perangkat daerah.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
			2. Tersosialisasinya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) pada masing-masing perangkat daerah. 3. Terimplemntasinya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) pada masing-masing perangkat daerah.
9.	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan	1. Tersusunnya hasil identifikasi dan inventarisasi kebutuhan SPP. 2. Adanya hasil pemetaan SPP yang ada dan yang perlu diperbaharui. 3. Tersusunnya SPP (baru, pengembangan maupun perubahan/penggantian). 4. Adanya pemahaman terhadap SPP yang ada. 5. Tersosialisasinya SPP kepada <i>stakeholders</i> . 6. Terimplementasinya SPP dalam pelaksanaan pada unit pelayanan.



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Unit Kerja	1. Tersusunnya pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal pada unit kerja. 2. Tersedianya dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal pada unit kerja. 3. Terimplementasinya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada unit kerja.
10.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	Monitoring	1. Tersusunnya pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan. 2. Tersusunnya Sistem Informasi Monitoring Program dan Kegiatan. 3. Tersosialisasi dan internalisasi penyelenggaraan program dan kegiatan.
		Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	1. Tersusunnya evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan tahunan. 2. Terimplementasinya evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan tahunan.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		Evaluasi dan Pelaporan Lima Tahunan	1. Tersusunnya evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lima tahunan. 2. Terimplementasinya evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lima tahunan.



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

C. AGENDA PRIORITAS DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN						KEBUTUHAN ANGGARAN JUMLAH (Jutaan)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
QUICK WINS								
1	e – Service Bidang Sistem Informasi Pemerintahan	150	200	225	250	275	300	1.400
2	e – Service Bidang Pelayanan Perizinan dan Investasi dan Inovasi layanan	60	65	70	75	80	85	435
3	e – Service Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	100	150	200	225	250	275	1.200
4	e – Procurement	500	550	600	650	700	750	3.750
Jumlah Kebutuhan Program Quick Wins								6.785
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN								
1	Pembentukan Tim Manajemen Perubahan		15	15				30
2	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan			50				50
3	Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen			30	30	40		100



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN						KEBUTUHAN ANGGARAN JUMLAH (Jutaan)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi							
Jumlah Kebutuhan Program Manajemen Perubahan								180
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
1	Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa	325	330	335	340	345	350	2.025
2	Penyusunan Peta Regulasi Daerah	25	30	35	40	45	50	215
Jumlah Kebutuhan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								2.240
PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI								
1	Restrukturisasi/ Penataan Kelembagaan Perangkat daerah	50	75	100	125	150	175	675
2	Penguatan Kelembagaan secara Fungsional	30	40	50	55	60	65	300
3	Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Perangkat daerah	15	20	25	30	35	40	165
Jumlah Kebutuhan Program Penataan dan Penguatan Organisasi								1.140



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN						KEBUTUHAN ANGGARAN JUMLAH (Jutaan)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA								
1	Penyusunan Dokumen SOP (Standard Operating Procedures)	30	30	35	40	45	50	230
2	Pengembangan e-government	300	310	320	330	340	350	1.950
Jumlah Kebutuhan Program Penataan Tata Laksana								2.180
PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR								
1	Penataan Sistem Rekrutmen Aparatur	150	175	200	225	250	300	1.300
2	Analisis Jabatan	400					400	800
3	Analisis Beban Kerja		400				400	800
4	Evalusi Jabatan			350				350
5	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	60					60	120
6	Assesment Aparatur berdasarkan Kompetensi		35	35	35	35	35	175
7	Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu	50	50	50	50	50	50	300



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN						KEBUTUHAN ANGGARAN JUMLAH (Jutaan)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
8	Pengembangan Database Kepegawaian		40	40	40	40	40	200
9	Pengembangan Diklat berbasis kompetensi		950	900	850	800	750	4,250
10	Penyusunan Pola Karir		30	35	40	50	50	205
Jumlah Kebutuhan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur								8.500
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN								
1	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	400	425	450	475	500	500	2.750
2	Peningkatan Peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selaku <i>Quality Assurance</i>	15	20	20	25	30	30	140
Jumlah Kebutuhan Program Penguatan Pengawasan								2.890
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA								
1	Penguatan AKIP	40	45	50	55	60	65	315
2	Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi	30	35	40	45	50	55	255
3	Penyusunan Indikator Kinerja	10	15	20	25	30	30	130



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN						KEBUTUHAN ANGGARAN JUMLAH (Jutaan)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK)							
Jumlah Kebutuhan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja								700
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK								
1	Penerapan Standar Pelayanan Publik pada unit pelayanan	200	200	225	230	240	250	1.345
2	Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada unit kerja	150	175	200	225	250	275	1.275
Jumlah Kebutuhan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								2.620
PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN								
1	Monitoring (rutin dan insidentil)		20	25	30	35	40	150
2	Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	30	30	30	30	30	30	180
3	Evaluasi dan Pelaporan Lima Tahunan	25	25	25	25	25	25	150
Jumlah Kebutuhan Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan								480
TOTAL KEBUTUHAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SUMBAWA								27.715.000.000



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

Total Kebutuhan Anggaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 - 2022 adalah Rp. 27.715.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah)



**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah minimal setahun sekali;
3. Survey rutin secara *online*.
4. Pengelolaan pengaduan masyarakat dan implemementasi LaporSP4N!.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin Tim Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi dan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi minimal 8 (delapan) kali dalam setahun sesuai dengan Kelompok Kerja Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat maupun rapat pleno tim.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, minimal satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan masyarakat.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, minimal dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;



5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah minimal setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara *online*.
4. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

**BAB VI
PENUTUP**

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2017-2016 yang terdiri dari rencana kerja yang rinci dan berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Road Map Reformasi Birokrasi Tahap II ini merupakan kelanjutan dari Road Map Reformasi Birokrasi Tahao I yang juga memuat tahapan rencana kerja rinci dan berkelanjutan baik program dan kegiatan bari maupun pemantapan, pemeliharaan dan pengembangan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Adapun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam kerangka makro maupun mikro dengan 8 (delapan) area perubahan, meliputi estimasi kebutuhan anggaran, sasaran, dan kriteria keberhasilannya maupun prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahap II (Tahun 2017-2021) ini merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan kerangka waktu tahun kedua pelaksanaannya sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian terjadi sinergitas dan simultan arah pelaksanaan reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun ke depan melalui program-program yang berorientasi pada *outcomes* yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang semakin baik. Road Map Reformasi birokrasi ini menjadi panduan bagi perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah dan upaya strategis



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

dalam melakukan pembenahan internal organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen yang kuat, dukungan dari semua pihak baik masyarakat maupun swasta dan menjadi tanggungjawab bersama antara pimpinan beserta seluruh jajaran aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik lagi di Kabupaten Sumbawa. Terima Kasih.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI (Matriks Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa)

Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan		Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung Jawab	Regulator
			Awal	Akhir				
Quick Wins I E-service Bidang Sistem Informasi Pemerintahan	Tersedianya Pengelolaan web yang cepat, dan merata	- Penataan pelayanan Sistem informasi pemerintahan	2017		- Terbangunnya sistem informasi bidang pemerintahan , web-site yang dapat berfungsi sebagai media peningkatan pelayanan - Peningkatan jaringan web site - Penyampaian data informasi yang akurat	1.400	Pengelola Web (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik)	
		- Sosialisasi dan implementasi	2017	2018				
		- Evaluasi kegiatan	2017	2018				
Quick Wins II E-service Bidang Pelayanan Perizinan dan Investasi	Terbangunnya sistem pelayanan perizinan dan investasi yang terpadu	- Penataan Pelayanan Perizinan dan Investasi	2017		- Terbangunnya sistem informasi bidang pelayanan perizinan dan investasi - Meningkatnya IKM terhadap pelayanan perizinan dan investasi - Meningkatnya investasi di daerah.	435	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		- Sosialisasi dan implementasi	2017	2018				
		- Evaluasi Kegiatan	2017	2018				
Quick Wins III E-service Bidang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Tersedianya Pelayanan Terpadu Kecamatan di 24 Kecamatan	- Pengkajian Pelimpahan Kewenangan dan Penataan Pelayanan di Kecamatan	2017		- Terwujudnya Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat - Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat	1.200	Bagian Pemerintahan dan 24 Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa	
		- Sosialisasi dan implementasi	2017	2018				
		- Evaluasi Kegiatan	2017	2018				
Quick Wins IV E-Procurement	Tersedianya kelembagaan ULP dan LPSE yang adil transparan	- Penataan dan Peningkatan Unit layanan Pengadaan dan layanan Pengadaan Sistem Elektronik	2017		- Terwujudnya pemberian pelayanan dibidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang profesional, aman, cepat, mudah, efektif, efisien, transparan, terbuka dan bersaing, adil	3.750	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
		- Sosialisasi dan implementasi	2017	2018				
		- Evaluasi kegiatan	2017	2018				



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program / Kegiatan	Output	Tahapan / Kerja	Waktu		Kriteria / Indikator	Anggaran	Penanggung Jawab	Regulasi
					dan akuntabel - Meningkatnya kualitas pelayanan - pengadaan barang dan jasa			
Manajemen Perubahan								
Pembentukan tim Manajemen Perubahan	Terwujudnya implementasi strategi manajemen perubahan	- Persiapan Pembentukan Tim	2017	2018	- Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan	180	Inspektorat, Bappeda, Setda, BKPP, BPKAD	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
Penyusunan strategi manajemen perubahan		- Pembentukan Tim	2017	2018	- Terbangunnya Kinerja Tim Manajemen Perubahan			
		- Penyusunan Agenda kerja	2017	2018	- Adanya dokumen strategi manajemen perubahan sebagai pedoman pelaksanaan program			
Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan			2017	2018	- Tersosialisasinya agenda program strategi manajemen perubahan kepada stakeholders - Adanya internalisasi strategi manajemen perubahan kepada stakeholders			
					- Terbangunnya budaya perubahan di internal pemerintahan			
Penataan Peraturan Perundang-undangan						2.240		
Penataan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	- Persiapan Pembentukan Tim	2017		- Terbangunnya data base bidang hukum dan perundang-undangan		Bagian Hukum, Tim Pelaksana area Perubahan Penataan perundang-undangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Peta Regulasi Daerah		- Identifikasi dan harmonisasi regulasi daerah	2017	2018	- Adanya hasil review atau harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah			
		- Finalisasi hasil	2017	2019	- Adanya hasil evaluasi perundang-undangan di daerah yang dapat digunakan			



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program/ Kegiatan	Output	Arahkan Kerja	Waktu Pelaksanaan		Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung Jawab	Regulasi
			Tahun	Agal				
					untuk kegiatan deregulasi maupun regulasi - Terwujudnya peta dan program regulasi daerah - Adanya sosialisasi dan dokumentasi peta regulasi daerah			
Penataan dan penguatan Organisasi - Restrukturisasi/ Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah - Penguatan Kelembagaan secara fungsional	Terbentuk nya organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	- Penataan struktur, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah - Penetapan hasil penataan - Evaluasi kegiatan - persiapan kajian peningkatan kapasitas kelembagaan secara fungsional perangkat daerah - finalisasi hasil pengkajian - evaluasi kegiatan - persiapan kajian pemberdayaan kapasitas kelembagaan - finalisasi hasil pengkajian - evaluasi kegiatan	2017 2018 2018	 2022 2022	- Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing bureaucracy</i>) terbangunnya tugas pokok dan fungsi yang tidak tumpang tindih, <i>overload</i> maupun tarik ulur kewenangan - adanya kejelasan dan kesesuaian dengan urusan yang ditangani terwujudnya organisasi yang berorientasi fungsional - adanya wadah jabatan fungsional di dalam kelembagaan organisasi perangkat daerah - adanya kajian dan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	1.140	Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur dan Tim Kajian Perangkat Daerah	PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah SK Bupati Sumbawa Nomor 390 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Kajian dan Evaluasi Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah TA 2016
Penataan Tata Laksana Penyusunan Dokumen SOP	Mekanisme, sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan	Identifikasi Penyusunan SOP - inventarisasi kebutuhan SOP - pemetaan SOP yang ada dan	2017 2017	 2018	- tersusunnya hasil identifikasi dan inventarisasi kebutuhan SOP	2.180	Bagian Organisasi dan Pendayagunaan	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program/ Kegiatan	Output	Tahapan kerja	Waktu Pelaksanaan		Kriteria Keberhasilan	Kendala	Penanggung Jawab	Regulasi
			awal	akhir				
Pengembangan e-government	prinsip-prinsip <i>good governance</i>	yang perlu diperbaharui	2017	2018	- adanya pemetaan SOP yang ada dan yang perlu diperbaharui		Aparatur, Tim Pelaksana Area	Republik Indonesia Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi pemerintahan
		- penyusunan instrumen SOP baik menyusun baru, perbaikan atau penyempurnaan	2017	2018	- tersusunnya instrumen SOP (baru, pengembangan maupun perubahan/penggantian)		Perubahan Penataan Ketatalaksanaan	
		- review dan integrasi draft SOP SKPD	2017	2018	- tersusunnya dokumen SOP		Tim Penyusun SOP	
		- finalisasi dokumen SOP	2017	2018	- tersusunnya dokumen SOP final pada masing-masing unit kerja		Kepala SKPD	
		- penetapan dokumen	2017	2018	- adanya pemahaman semua pihak terhadap SOP yang ada			
		Internalisasi, sosialisasi dan implementasi	2018	2022	- tersosialisasinya SOP kepada <i>stakeholders</i>			
		- internalisasi SOP kpd semua aparatur	2018	2022	- terimplementasinya SOP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi			
		- sosialisasi SOP kpd <i>stakeholders</i>	2018	2022				
		- implementasi SOP dalam pelaksanaan tupoksi	2018	2022				
		evaluasi kegiatan penyusunan SOP	2018	2022				
		- monitoring implementasi SOP	2018	2022				
		- Evaluasi SOP	2018	2022				
Pengembangan e-government		- persiapan kajian pengembangan e-government	2018	2019	- adanya kajian pengembangan e-government			
		- penyiapan instrument dan tata naskah dinas elektronik	2018	2019	- tersusunnya instrument dan sistem Tata Naskah Dinas Elektronik			
		- pembenahan dan peningkatan sistem teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan e-government	2019	2022	- adanya pembenahan dan peningkatan sistem teknologi informasi (keuangan, kepegawaian, pendidikan, kependudukan, pencatatan sipil, kearsipan dan ketenagakerjaan)			
Pengembangan e-government					- tersosialisasinya Tata Naskah Dinas Elektronik dan SMS Gateway			
					- terinternalisasinya e-government kepada <i>stakeholders</i>			
					- terimplementasinya e-government			



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program/ Kegiatan	Output	Indikator	Perencanaan		Ketercapaian	Kendala	Penanggung Jawab	Regulasi
			Awal	Akhir				
Penataan Sistem manajemen SDM aparatur						8.500		
Penataan Sistem Rekrutmen Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera	- pengembangan dan perbaikan sistem rekrutmen pegawai	2017	2022	- tersusunnya pengembangan dan perbaikan sistem rekrutmen pegawai		Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tim Pelaksana Area Perubahan Penataan MSDM aparatur bersama Tim kegiatan masing-masing Tim Pengadaan Pegawai	
		- sosialisasi dan implementasi Sistem Pengadaan pegawai	2018	2022	- tersosialisasinya sistem pengadaan pegawai			
		- evaluasi kegiatan	2018	2022	- terimplementasinya pengadaan pegawai yang transparan, akuntabel dan mudah diakses publik			
Analisis Jabatan		- penyusunan dan penyempurnaan analisis jabatan	2017		- tersedianya dokumen hasil analisis jabatan		Tim Analisis Jabatan	Permendagri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan ANJAB di lingkungan departemen Dalam negeri dan Pemerintah Daerah.; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang ANJAB
		- sosialisasi hasil analisis jabatan	2018		- adanya penetapan hasil analisis jabatan			
		- evaluasi kegiatan	2018	2022	- terimplementasinya hasil analisis jabatan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan tiap jabatan			
Analisis Beban Kerja		- Penyusunan dan penyempurnaan ABK	2018		- Tersedianya dokumen hasil analisis beban kerja		Tim ABK	Permendagri No. 12 Th. 2008 tentang Pedoman pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah
		- Sosialisasi hasil ABK	2018	2022	- adanya penetapan hasil analisis beban kerja			
		- Evaluasi Kegiatan	2018	2022	- Terimplementasinya hasil analisis beban kerja sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan tiap jabatan			
Evaluasi Jabatan		- Penyusunan Evaluasi Jabatan	2018		- Tersedianya rangking jabatan.		Tim Evaluasi Jabatan	Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
		- Sosialisasi Hasil Evaluasi Jabatan	2018	2022	- Tersedianya tingkatan jabatan			



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan		Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung Jawab	Regulasi
			Awal	Akhir				
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan		- Evaluasi Kegiatan	2018	2022	- tersedianya harga setiap jabatan - tersedianya pedoman pemberian tunjangan kinerja		Tim Penyusun SKJ	Evaluasi Jabatan PNS
		- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	2018		- Tersedianya dokumen standar kompetensi pada setiap jabatan			Peraturan Kepala BKN No.46A Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan SKJ
		- sosialisasi SKJ - Evaluasi Kegiatan	2018 2018	2022 2022	- penetapan SKJ - terimplementasinya SKJ sebagai dasar penentuan kompetensi seseorang			Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SKJ
Assesment Aparatur berdasarkan kompetensi		- Penyusunan Rencana Assesment Aparatur berdasarkan kompetensi	2017	2022	- tersedianya hasil inventarisasi dan identifikasi kompetensi pejabat struktural dan fungsional		Tim Assesment Aparatur	Peraturan Kepala BKN No.7 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS
		- pelaksanaan assesment terhadap pejabat struktural	2018	2022	- tersusunnya peta profil kompetensi individu seluruh pejabat struktural dan fungsional			Peraturan Kepala BKN No.8 Th. tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS
Penerapan sistem Penilaian Kinerja Individu		- pemetaan hasil assesment pejabat struktural.	2018	2022			Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	
		- pengembangan dan pembenahan sistem	2018	2022	- tersedianya pedoman penilaian kinerja individu			
		- sosialisasi dan implementasi sistem	2018	2022	- terimplementasinya sistem penilaian kinerja individu yang terukur			
Pengembangan Data Base Kepegawaian		- evaluasi kegiatan	2019	2022			BKPP dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah	
		- pengembangan dan pembenahan data base	2018	2012	- Tersedianya data base kepegawaian yang up to date dan valid			
		- sosialisasi dan implementasi sistem data base	2018	2022	- tersedianya data dan informasi eksekutif pegawai (untuk keperluan Baperjakat)			



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung Jawab	Regulasi
			Tahun	Tahun				
Pengembangan Diklat Berbasis Kompetensi		- pengembangan dan pembenahan diklat berbasis kompetensi - sosialisasi dan implementasi diklat berbasis kompetensi - evaluasi kegiatan	2018	2019	- tersedianya hasil analisis diklat baik teknis maupun fungsional		BKPP	...
			2019	2022	- tersedianya dokumen diklat berbasis kompetensi			...
			2020	2022	- terimplementasinya diklat berbasis kompetensi			...
Penyusunan Pola Karier		- Pengembangan dan pembenahan sistem pola karier aparatur - sosialisasi dan implementasi sistem pola karier - evaluasi kegiatan	2019	2022	- tersedianya pengembangan dan pembenahan sistem pola karier aparatur		BKPP	
			2019	2022	- terimplementasinya pola karier aparatur			
			2020	2022				
Penguatan Pengawasan						2.890		
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas KKN	Pemahaman komprehensif terhadap PP No.60 Th.2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah - Pemetaan kondisi SPIP - membentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP - diklat Satgas SPIP dalam rangka percepatan - penyusunan petunjuk teknis penerapan SPIP - sosialisasi dan implementasi SPIP - evaluasi kegiatan	2017	2022	- terinternalisasi pemahaman sistem pengendalian internal pemerintah		Inspektorat	Permendagri No.64 Th.2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota
			2017	2018	- tersedianya hasil pemetaan kondisi SPIP			PP No.60 Th.2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PP No.79 Th 2005 ttg Pedoman
			2017	2022	- terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) SPIP			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			2017	2022	- terlaksananya diklat Satgas SPIP			
			2018	2022	- terimplementasinya SPIP			
Peningkatan Peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selaku <i>Quality Assurance</i>		penyusunan susunan, tugas dan tanggung jawab pemeriksa sesuai dengan standar pemeriksaan - penyusunan prosedur pemeriksaan - pemeriksaan	2018	2022	- Tersusunnya standar dan prosedur pemeriksaan dan pengawasan reguler			
			2018	2022	- terimplementasinya pedoman pengawasan			



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program / Kegiatan	Subsistem	Subtugas / Kerja	Waktu Pelaksanaan		Kriteria / Sasaran	Rencana Anggaran	Penanggung Jawab	Regulasi
			Tahun	Tahun				
		yang dilakukan aparat pengawasan - pelaporan hasil pemeriksaan - identifikasi perbaikan proses pemeriksaan (regulasi, SDM, sarana dan prasarana) - sosialisasi dan implementasi pedoman pengawasan - evaluasi kegiatan	2018	2022				
			2018	2022				
			2018	2022				
			2019	2022				
Penguatan Akuntabilitas Kinerja						700		
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja birokrasi	review petunjuk teknis pelaporan akuntabilitas kinerja					Tim Pelaksana Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Peraturan Pemerintah No.8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; Instruksi Presiden No.7 Th.1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
		- penyusunan Pedoman Evaluasi LAKIP pada unit kerja (SKPD)	2017	2022	- tersusunnya pedoman evaluasi pelaporan LAKIP pd unit Kerja SKPD		Tim Penyusun LAKIP masing-masing perangkat daerah	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Th.2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		- rapat-rapat koordinasi proses penyusunan LAKIP	2017	2022	- tersosialisasinya pedoman evaluasi pelaporan LAKIP			
		Sosialisasi dan implementasi Pedoman Penyusunan LAKIP	2017	2022	- tersedianya LAKIP tiap tahun			
Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi		Evaluasi Kegiatan	2017	2022				
		- pengembangan dan pembenahan sistem manajemen kinerja organisasi	2017	2022	- Tersusunnya instrument manajemen kinerja organisasi		Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	
		- sosialisasi dan implementasi sistem manajemen kinerja organisasi	2017	2022	- terimplementasinya sistem manajemen kinerja organisasi			
		- evaluasi kegiatan	2018	2022				



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program/ Kegiatan	Output	Uraian Kerja	Waktu Pelaksanaan		Keterangan Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung Jawab	Regulasi
			Awal	Akhir				
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan Kinerja (PK)		review IKU dan PK dari SKPD - penyusunan draft Perbup dan SK ttg IKU dan PK - rapat-rapat koordinasi proses penyusunan IKU dan PK bersama masing2 SKPD	2017 2017	 2018	- tersusunnya indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) pada masing-masing SKPD - tersosialisasinya indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) pada masing-masing SKPD - terimplementasinya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan Kinerja (PK) pada masing-masing SKPD.		Tim Penyusun IKU dan PK	
Peningkatan Pelayanan Publik						2.620		
Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan	Terwujudnya kualitas pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat	Pengembangan Sistem Pelayanan Publik - identifikasi Unit Kerja Pelayanan - Pemetaan Standar Pelayanan yang ada dan yang perlu diperbarui - penyusunan instrumen dan penerapan SPP pada Unit pelayanan	2017 2018	 2022	- tersusunnya hasil identifikasi dan inventarisasi kebutuhan SPP - adanya hasil pemetaan SPP yang ada dan yang perlu diperbaharui - tersusunnya SPP (baru, pengembangan maupun perubahan/penggantian) - adanya pemahaman semua pihak terhadap SPP yang ada - tersosialisasinya SPP kepada stakeholders - Terimplementasinya SPP dalam pelaksanaan pada unit pelayanan		Tim Pelaksana Area Perubahan Peningkatan Pelayanan Publik Tim Penyusun SPP masing-masing SKPD Tim Percepatan SPM Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang penerapan SPM di Kabupaten Sumbawa	UU No.25 Th.2009 ttg Pelayanan Publik; PP No.96 Th.2012 ttg Pelaksanaan UU No.25 tahun 2009 ttg Pelayanan Publik; UU no. 37 Th.2008 ttg Ombudsman RI; Permenpan dan RB No. 36 Th. 2012 ttg Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; Permenpan dan RB No. 38 Th.2012 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; Permenpan dan RB No. 66 Th. 2012 ttg Pedoman penilaian Kinerja Pembina/ Penanggungjawab dan peningkatan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Unit Kerja		Persiapan Penerapan SPM - Identifikasi penerapan SPM pada Unit kerja - Pemetaan penerapan SPM	2017 2017	2022 2022	- tersusunnya pencapaian penerapan Standar Pelayanan		Tim Percepatan dan Evaluasi Penerapan SPM	



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program/ Kegiatan	Output	Tahapan kerja	Waktu Pelaksanaan		Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung Jawab	Regulasi
			2017	2022				
		- pada Unit Kerja yang memiliki SPM - Penyusunan instrumen dan penerapan SPM pada unit kerja - integrasi dan finalisasi dokumen penerapan SPM - penetapan dokumen SPM - internalisasi, sosialisasi dan implementasi - internalisasi dokumen penerapan SPM kepada semua Unit Kerja - Sosialisasi penerapan SPM kepada stakeholders - implementasi penerapan SPM pada Unit Kerja - Monitoring pelaksanaan/implementasi SPM - Evaluasi penerapan SPM	2017	2022	minimal pada Unit Kerja tersedianya dokumen penerapan SPM pada Unit Kerja Terimplementasi nya penerapan SPM pada Unit Kerja			Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						480		Tools nasional untuk Penilaian dan Evaluasi
Monitoring	Tertelaksananya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) baik secara manual maupun online dan monitoring seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi birokrasi	- Persiapan - Penyusunan Evaluasi dan pelaporan Lima Tahunan - Pengembangan dan Peningkatan pemahaman mengenai penyusunan laporan evaluasi lima tahunan pada masing2 program Reformasi birokrasi - Implementasi evaluasi Lima Tahunan melalui Rapat pimpinan, Rakord atau forum lainnya - Evaluasi kegiatan	2017	2022			- Tim Movev ; - Asesor Utama ; Inspektur Kabupaten - Tim Asesor PMPRB terdiri dari Inspekturat, SETDA, BAPPEDA, DPPK, BKPP - Asesor dan Tim Teknis Masing-masing SKPD untuk melakukan self assessment (PMPRB) bagi SKPD sebagai langkah awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi (PMPRB) - Surat Edaran Menpan dan RB No. 12 Th. 2012 ttg Manual Penerapan Pedoman PMPRB; - Permenpan dan RB No.31 Th. 2012 ttg Petunjuk Teknis Pedoman PMPRB secara online